

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tindakan tersebut menjadi simbol berdirinya Indonesia sebagai negara bangsa yang sepenuhnya berdaulat dan memiliki kemandirian.¹ Proklamasi tersebut sekaligus menjadi titik balik perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sebelumnya terjebak dalam cengkeraman kolonialisme selama lebih dari tiga abad. Makna proklamasi tidak hanya sebatas pernyataan politik, tetapi juga representasi tekad kolektif seluruh rakyat untuk menentukan masa depan tanpa campur tangan kekuatan asing. Pada fase ini muncul optimisme besar tentang lahirnya tatanan sosial-politik baru yang lebih adil, merdeka, dan berdaulat, yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan negara modern Indonesia.

Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 segera diikuti oleh serangkaian permasalahan struktural yang menuntut penyelesaian segera, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, geopolitik eksternal, serta sistem pertahanan dan keamanan nasional.² Masa awal kemerdekaan ditandai oleh pencarian bentuk negara, pergulatan ideologis, serta perebutan pengaruh antara berbagai kekuatan politik seperti nasionalis, komunis, dan Islam. Ketidakstabilan politik ini melahirkan banyak gagasan dan perdebatan tentang arah masa depan Indonesia, yang mendorong lahirnya berbagai karya pemikiran politik dari tokoh-tokoh penting. Secara umum, masa-masa awal ini menjadi periode yang penuh dinamika dan ketidakpastian, karena setiap kelompok politik memiliki agenda dan visi yang berbeda tentang bagaimana Indonesia seharusnya dibangun. Pemerintah pusat harus bekerja keras menghadapi tekanan internal dan eksternal, termasuk ancaman kembalinya kolonialisme Belanda melalui agresi militer. Di sisi lain,

¹ Sarina, *Skripsi "Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (Studi Tentang Pembentukan Negara Islam Indonesia 1945-1962)"*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018), hal. 32

² Miftakhur Ridlo, "Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer dan Agama)", *Jurnal Pena Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019), hal. 19

kondisi ekonomi yang sangat terpuruk akibat perang dan inflasi tinggi turut memperburuk situasi nasional. Dalam konteks demikian, perdebatan ideologis berkembang semakin intens, melahirkan berbagai aliran pemikiran yang memperebutkan legitimasi dan arah pembangunan bangsa.

Soekarno melihat bahwa pengalaman pahit penjajahan telah membangkitkan kesadaran kolektif rakyat Indonesia. Kesadaran ini kemudian menjadi roh perjuangan yang tercermin dalam tiga arus besar pemikiran: nasionalisme, Islam, dan komunisme. Menurut Soekarno, ketiga kekuatan ini tidak seharusnya saling bertentangan, karena dalam situasi sebagai bangsa terjajah, persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan. Ia menekankan bahwa jika nasionalis, Islamis, dan Marxis mampu bekerja bersama, maka mereka akan menjadi satu kekuatan besar yang tak dapat dihentikan.³ Gagasan penyatuan tiga kekuatan tersebut tergambar dalam konsep Nasakom, yang kemudian menjadi doktrin politik Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Bagi Soekarno, Nasakom adalah formula untuk mempersatukan kekuatan politik terbesar di Indonesia sehingga negara tidak mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Pandangan ini juga merupakan refleksi dari pengalaman kolonialisme yang sering memanfaatkan perpecahan internal sebagai strategi penjajahan. Dengan demikian, gagasan Soekarno bukan hanya ide persatuan politik, tetapi juga strategi geopolitik untuk menjaga kedaulatan nasional.

Kelompok komunis, di bawah artikulasi ideologis tokoh-tokoh seperti Muso dan Amir Syarifuddin, menilai bahwa struktur dan orientasi politik Republik di bawah kepemimpinan Soekarno tidak sejalan dengan garis perjuangan revolusioner yang mereka yakini. Ketidaksetujuan itu mendorong mereka melakukan perlawanan yang kemudian memuncak dalam Peristiwa Madiun tahun 1948. Pemberontakan tersebut akhirnya gagal, dan kedua pemimpinnya tewas ditembak. Konflik antara pemerintah dan kelompok komunis pada masa itu memperlihatkan betapa rapuhnya konsolidasi politik nasional pasca-kemerdekaan. Peristiwa Madiun bukan hanya pemberontakan bersenjata, tetapi juga merupakan simbol pertarungan ideologi yang semakin tajam. Sementara dari kalangan Islam,

³ Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme*, (Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1963), hal. 6

Kartosoewirjo pada awalnya tidak menempatkan Republik Indonesia sebagai pihak yang berlawanan. Namun, akumulasi kekecewaan yang ia dan para pengikutnya rasakan meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, militer, agama, hingga psikologis perlahan membentuk sikap oposisi dan mendorongnya mengambil jalan yang berbeda dari pemerintah.⁴ kekecewaan kalangan Islam seperti yang dialami Kartosoewirjo menunjukkan bahwa persoalan identitas dan representasi politik menjadi isu sensitif yang belum terselesaikan. Kedua dinamika ini turut mempengaruhi arah perkembangan politik Indonesia dan mempertegas munculnya kelompok-kelompok oposisi yang merasa tidak diakomodasi oleh pemerintah pusat.

Kekecewaan awal Kartosoewirjo bermula ketika frasa “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta yakni rumusan “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dihapus oleh Hatta. Keputusan tersebut dianggap sebagai pukulan berat bagi umat Islam yang sejak masa kolonial Belanda berharap syariat Islam bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Kartosoewirjo, penghapusan itu menandai kekalahan politik Islam di hadapan kelompok nasionalis sekuler pada saat Republik Indonesia baru berdiri. Dari situlah muncul bibit-bibit penentangan terhadap RI, yang kemudian diperkuat oleh berbagai kekecewaan lain yang mengikuti.⁵

Kekecewaan Kartosoewirjo terhadap arah perkembangan negara khususnya dominasi ideologi nasionalisme dan komunisme dalam pemerintahan mendorongnya merumuskan suatu konsep politik Islam yang ia yakini sebagai pilihan lain bagi masa depan bangsa. Ia melihat bahwa ideologi-ideologi yang berkembang saat itu tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan umat dan bangsa menurut pandangannya. Karena itu, Kartosoewirjo berupaya menawarkan suatu sistem politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

⁴ Sarina, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (Studi Tentang Pembentukan Negara Islam Indonesia 1945-1962)*, hal. 32

⁵ Sarina, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (Studi Tentang Pembentukan Negara Islam Indonesia 1945-1962)*, hal. 33

Gagasan-gagasan tersebut kemudian dirumuskan secara lebih jelas dalam karya tulisnya yang berjudul *Haluan Politik Islam*. Buku ini menjadi salah satu sumber penting untuk memahami pandangan Kartosoewirjo mengenai bagaimana politik Islam seharusnya diterapkan dalam kehidupan bernegara, serta menggambarkan visi alternatif yang ia tawarkan di tengah ketidakpuasan terhadap arah Republik Indonesia pada masa itu.

Buku tersebut bukan sekadar menjabarkan konsep dasar mengenai negara Islam, tetapi juga menggambarkan kritik Kartosoewirjo terhadap kondisi politik Indonesia pada masa itu. Melalui tulisannya, ia berupaya mengajukan model kenegaraan yang berlandaskan syariat Islam serta menempatkan identitas keislaman sebagai pilar utama dalam pembentukan masyarakat. Dengan cara ini, gagasan politik Kartosoewirjo turut mewarnai perdebatan mengenai ideologi nasional yang berkembang pada masa awal kemerdekaan.

Pendekatan historis terhadap figur Kartosoewirjo sejauh ini mayoritas masih terpaku pada dimensi pemberontakan DI/TII serta dinamika pertempuran fisik antara kelompok tersebut dan militer Republik Indonesia. Karya-karya seperti Cornelis van Dijk dalam *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* lebih menekankan pada dinamika gerakan, struktur organisasi, serta strategi politik-militer Darul Islam sebagai sebuah pemberontakan terhadap negara. Fokus yang dominan pada aspek gerakan menyebabkan pemikiran Kartosoewirjo sering kali dipahami secara reduktif, seolah-olah gagasan politiknya semata-mata merupakan justifikasi ideologis bagi tindakan pemberontakan, bukan sebagai hasil refleksi intelektual yang lahir dari konteks sejarah tertentu.⁶

Beberapa penulis lain, seperti Al Chaidar dalam *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, telah berupaya menempatkan Kartosoewirjo sebagai tokoh ideologis Darul Islam dengan menyajikan berbagai dokumen, pidato, dan pernyataan politiknya. Namun

⁶ Cornelis van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, Terj. Grafiti Pers (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hal. 1-5

demikian, pembahasan terhadap buku *Haluan Politik Islam* dalam karya tersebut masih bersifat parsial dan digunakan sebagai bagian dari legitimasi ideologi Darul Islam secara umum, bukan sebagai teks pemikiran politik yang dianalisis secara khusus, sistematis, dan kontekstual. Akibatnya, struktur argumentasi, konsep-konsep kunci, serta fungsi intelektual buku tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai sebagai objek kajian tersendiri.⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memiliki keunikan karena memfokuskan kajian pada *Haluan Politik Islam* sebagai produk sejarah pemikiran, bukan sekadar sebagai dokumen ideologis gerakan DI/TII. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan sejarah intelektual, skripsi ini berupaya menempatkan buku tersebut dalam konteks sosial-politik saat ia ditulis, sekaligus menganalisis struktur dan konsep pemikiran politik Kartosoewirjo secara sistematis. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya menjelaskan “apa isi buku *Haluan Politik Islam*”, tetapi juga menjawab “mengapa buku tersebut ditulis, dalam konteks apa, dan apa maknanya dalam sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia”. Inilah yang menjadi dasar argumentatif mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan memiliki kontribusi akademik dalam kajian sejarah pemikiran politik Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pertarungan ideologi antara nasionalisme, komunisme, dan Islam, serta lahirnya gagasan politik Kartosoewirjo yang kemudian dituangkan dalam *Haluan Politik Islam*, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana latar historis munculnya buku *Haluan Politik Islam*?
2. Apa saja konsep utama dalam pemikiran politik Kartosoewirjo sebagaimana tertuang dalam buku *Haluan Politik Islam*?

⁷ Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hal. 45-52

C. Tujuan Masalah

Keragaman ideologi yang berkembang pada masa awal kemerdekaan Indonesia menciptakan dinamika pemikiran politik yang sangat kompleks. Berbagai tokoh nasional memberikan kontribusi pemikiran mereka untuk menentukan arah perjalanan bangsa yang baru merdeka. Dalam konteks ini, Kartosoewirjo muncul sebagai salah satu tokoh yang menawarkan alternatif pemikiran melalui konsep politik Islam yang kemudian dirumuskan secara sistematis dalam bukunya *Haluan Politik Islam*. Melihat pentingnya posisi *Haluan Politik Islam* sebagai salah satu dokumen ideologis yang lahir dari pergulatan politik bangsa, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami secara mendalam latar historis munculnya karya tersebut serta menelaah gagasan-gagasan utama yang dikembangkan Kartosoewirjo. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menguraikan latar historis munculnya buku *Haluan Politik Islam*. Tujuan ini mencakup penelusuran terhadap kondisi politik, sosial, dan ideologis pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang memengaruhi pemikiran Kartosoewirjo, serta faktor-faktor yang mendorong penyusunan karya tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menguraikan konsep-konsep utama dalam pemikiran politik Kartosoewirjo sebagaimana termuat dalam buku *Haluan Politik Islam*. Tujuan ini bertujuan mengungkap struktur dan isi buku *Haluan Politik Islam* termasuk pemikiran politiknya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memetakan berbagai penelitian terdahulu dan menunjukkan posisi penelitian ini di antara karya-karya yang telah ada. Dengan menelaah literatur terkait, penulis dapat memahami sejauh mana topik tentang pemikiran politik Kartosoewirjo, gerakan Darul Islam, serta dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis,

ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas pemikiran Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, di antaranya sebagai berikut:

1. Buku

- a. Al-Chaidar (1999) *“Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo; Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru”*. Dalam bukunya Al Chaidar menekankan bahwa pemikiran politik Kartosoewirjo tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang interaksi intelektualnya dengan berbagai wacana ideologis, mulai dari Islam modernis, Pan-Islamisme, hingga pengaruh sosialisme dan anti-imperialisme yang berkembang di Hindia Belanda. Buku tersebut menggambarkan bahwa Kartosoewirjo merupakan figur yang menempuh jalur autodidak dalam pendalaman Islam yang kemudian berpadu dengan pengalaman sosial dan politiknya pada masa kolonial serta pendudukan Jepang.⁸ Buku Al Chaidar juga menyoroti bagaimana gagasan *Darul Islam* Kartosoewirjo berakar kuat pada idealisasi terhadap negara Madinah, pemikiran ulama salaf, dan semangat penegakan syariat secara menyeluruh. Al Chaidar memaparkan bahwa gagasan politik Kartosoewirjo mencapai puncaknya ketika ia memproklamasikan NII pada 7 Agustus 1949. Dalam bagian-bagian tertentu buku tersebut, ia mengutip berbagai dokumen resmi NII, termasuk naskah-naskah yang menunjukkan kecenderungan teologis dan struktural konsep negara yang hendak dibangun Kartosoewirjo.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Al Chaidar dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari aspek pembahasan, dalam buku Al Chaidar umumnya membahas aspek

⁸ Al Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII SM Kartosoewirjo Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama Dan Orde Baru*, (Jakarta: Darul Falah, 1999). Hal. 23

gerakan Darul Islam/TII, perjalanan sejarah pemberontakan, serta posisi politik Kartosoewirjo dalam hubungan dengan Republik Indonesia. Namun, kajian-kajian tersebut tidak meneliti secara khusus isi dan pemikiran yang dituangkan Kartosoewirjo dalam buku *Haluan Politik Islam*.

- b. Suwelo Hadiwijoyo (2013) "*Kahar Muzakkar & Kartosoewirjo: Pahlawan atau Pemberontak?!?*". Buku ini membahas secara komparatif dua tokoh penting dalam sejarah gerakan Islam bersenjata di Indonesia, yakni Kahar Muzakkar dan Kartosoewirjo. Dalam buku ini, Suwelo menempatkan Kartosoewirjo dalam kerangka sejarah politik nasional, khususnya terkait dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan relasinya dengan negara Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat historis-naratif dengan fokus pada tindakan politik, konflik bersenjata, serta polemik status Kartosoewirjo sebagai pahlawan atau pemberontak dalam historiografi Indonesia. Pembahasan mengenai Kartosoewirjo dalam buku ini menitikberatkan pada peran dan aktivitas politiknya sebagai pemimpin gerakan DI/TII, termasuk latar belakang sosial-politik yang mendorong terjadinya perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, pemikiran politik Kartosoewirjo sebagai sebuah konstruksi ideologis yang tertuang secara sistematis dalam karya tulisnya, khususnya buku *Haluan Politik Islam*, tidak menjadi fokus utama pembahasan. Buku ini lebih menekankan pada dimensi gerakan dan konsekuensi politik dari tindakan Kartosoewirjo dibandingkan dengan analisis mendalam terhadap teks dan gagasan politiknya.⁹
- Berbeda dengan buku tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji *Haluan Politik Islam* sebagai sumber primer untuk

⁹ Suwelo Hadiwijoyo, *Kahar Muzakkar & Kartosoewirjo: Pahlawan atau Pemberontak?!?*, (Jogjakarta: Palapa, 2013), hal. 118-209

menelusuri struktur, konsep, dan arah pemikiran politik Kartosoewirjo. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan sejarah intelektual, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya, yakni analisis terhadap pemikiran politik Kartosoewirjo sebagaimana dirumuskan dalam teks, bukan semata-mata melalui tindakan politik dan gerakan bersenjata. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian Suwelo Hadiwijoyo dengan menghadirkan perspektif pemikiran dan ideologi Kartosoewirjo secara lebih mendalam.

- c. Al-Chaidar (1999) "*Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*". Buku ini membahas pemikiran politik Kartosoewirjo dalam konteks sejarah berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Al Chaidar menempatkan Kartosoewirjo sebagai tokoh ideolog utama Darul Islam dengan menekankan legitimasi politik dan keagamaan dari gerakan tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat historis-deskriptif dengan penekanan pada pengumpulan fakta dan data sejarah, termasuk dokumen, peristiwa, serta narasi dari lingkungan Darul Islam. Dalam buku ini, pemikiran politik Kartosoewirjo dipaparkan secara luas melalui berbagai sumber, seperti pidato, pernyataan politik, dan dokumen-dokumen resmi NII. *Haluan Politik Islam* disebut dan digunakan sebagai salah satu rujukan penting, tetapi tidak dianalisis secara khusus sebagai teks yang berdiri sendiri. Pembahasan lebih diarahkan pada legitimasi ideologis Darul Islam secara keseluruhan, bukan pada analisis struktur, sistematika, dan konstruksi pemikiran politik Kartosoewirjo dalam satu karya tertentu.¹⁰

¹⁰ Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hal. 533-545

Berbeda dengan kajian Al Chaidar, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada buku *Haluan Politik Islam* sebagai sumber primer utama. Penelitian ini tidak bertujuan menilai benar atau salahnya gerakan Darul Islam, melainkan menganalisis pemikiran politik Kartosoewirjo sebagaimana dirumuskan dalam teks tersebut dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan sejarah intelektual. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian yang belum digarap secara mendalam oleh Al Chaidar, yaitu analisis tekstual-historis terhadap *Haluan Politik Islam* sebagai fondasi pemikiran politik Kartosoewirjo.

- d. Cornelis van Dijk “*Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Grafiti Pers (1983) dengan judul “*Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*”. Buku ini merupakan salah satu karya klasik yang membahas secara mendalam sejarah gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Van Dijk menggunakan pendekatan sejarah-politik dengan analisis yang komprehensif terhadap latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang melahirkan gerakan tersebut, serta dinamika konflik antara Darul Islam dan pemerintah Republik Indonesia. Dalam pembahasannya, van Dijk menempatkan Kartosoewirjo sebagai tokoh sentral gerakan Darul Islam, terutama dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan simbol perlawanan bersenjata. Fokus utama buku ini terletak pada struktur organisasi, strategi politik-militer, serta proses pemberontakan Darul Islam sebagai sebuah gerakan kolektif. Meskipun pemikiran ideologis Kartosoewirjo disebutkan dalam kaitannya dengan legitimasi gerakan, analisis terhadap karya tulis Kartosoewirjo, khususnya buku *Haluan Politik*

Islam, tidak menjadi perhatian utama dan tidak dibedah secara mendalam sebagai teks pemikiran politik.¹¹

Berbeda dengan pendekatan Cornelis van Dijk yang menitikberatkan kajian pada Darul Islam sebagai gerakan pemberontakan, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada pemikiran politik Kartosoewirjo sebagaimana tertuang dalam buku *Haluan Politik Islam*. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan sejarah intelektual, penelitian ini berupaya mengkaji teks sebagai produk pemikiran dan respon ideologis terhadap konteks politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian van Dijk dengan menghadirkan analisis pemikiran politik Kartosoewirjo dari sisi intelektual dan tekstual, bukan dari aspek pemberontakan dan konflik bersenjata semata.

2. Artikel Jurnal

- a. Jurnal Akbarudin Am, "Pemikiran S.M. Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2013) mengkaji secara mendalam gagasan Kartosoewirjo mengenai negara dan penolakannya terhadap Republik Indonesia. Jurnal ini menekankan bahwa Kartosoewirjo memandang Pancasila sebagai ideologi sekuler dan tidak mampu mewakili aspirasi mayoritas muslim Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa Kartosoewirjo menawarkan konsep Negara Islam Indonesia (NII) yang berpijak pada syariat Islam sebagai hukum tertinggi, sistem kepemimpinan imam, dan mekanisme syura sebagai bentuk demokrasi. Pembahasan jurnal juga menyoroti pengalaman politik Kartosoewirjo mulai dari keterlibatannya dalam Sarekat Islam, kedekatan intelektual dengan H.O.S. Tjokroaminoto, hingga peristiwa-peristiwa politik seperti Renville dan Linggarjati

¹¹ Cornelis van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, Terj. Grafiti Pers, hal. 1-98

yang dianggap membentuk orientasinya untuk mendirikan negara Islam. Pada bagian akhir, jurnal bahkan menilai bahwa konsep negara yang diusung Kartosoewirjo relevan diterapkan di Indonesia, dengan merujuk pada prinsip-prinsip fikih *siyasah dusturiyah* dan konteks masyarakat yang mayoritas muslim. Dengan demikian, jurnal ini lebih menitikberatkan pada analisis politik–normatif mengenai kelayakan dan kesesuaian konsep negara Islam Kartosoewirjo untuk Indonesia.¹²

Penelitian Akbarudin AM (2013) berfokus pada pemikiran Kartosoewirjo tentang Negara Republik Indonesia dan konsep Negara Islam Indonesia, namun kajian tersebut tidak menelaah karya primer Kartosoewirjo, terutama *Haluan Politik Islam*, yang sebenarnya merupakan teks penting dalam memahami struktur ideologinya. Pendekatan yang digunakan juga bersifat politis–normatif dan tidak mengurai perkembangan historis pemikiran Kartosoewirjo secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis *Haluan Politik Islam* melalui metode sejarah, sehingga dapat mengungkap pemikiran politik Kartosoewirjo secara lebih tekstual, historis, dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

- b. Jurnal Riyadi Suryana, “Politik Hijrah Kartosuwiryo: Menuju Negara Islam Indonesia”, *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 2 (2019). Jurnal ini menjadi salah satu studi penting yang membahas dinamika pemikiran dan perjuangan politik Kartosoewirjo, terutama terkait konsep politik hijrah sebagai dasar pergerakannya selama berada dalam PSII hingga terbentuknya Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Dalam artikel tersebut, penulis menelaah secara historis perjalanan politik Kartosoewirjo, mulai dari perannya di PSII, konflik internal partai, konsistensinya

¹² Akbarudin Am, “Pemikiran S.M. Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2013), hal. 357-378

dalam menganut sikap non-kooperatif, hingga implementasi politik hijrah dalam bentuk pembentukan TII dan deklarasi NII pada 7 Agustus 1949. Kajian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana konsep hijrah menjadi fondasi ideologis sekaligus strategi politik dalam perjuangan Kartosoewirjo melawan Pemerintah Hindia Belanda dan kemudian Republik Indonesia. Fokus utamanya berada pada penjelasan tentang asal-usul konsep politik hijrah, struktur pemikiran hijrah, dan implementasi politik hijrah dalam pembentukan Darul Islam dan NII. Melalui analisis tersebut, artikel ini memposisikan Kartosoewirjo sebagai figur yang mempertahankan garis perjuangan PSII dan Islam politik secara konsisten, terutama melalui jalur non-kooperatif terhadap kekuasaan kolonial dan negara nasional yang sekuler.¹³

Perbedaan penelitian Riyadi Suryana dengan penelitian ini yaitu, jurnal ini menggunakan pendekatan ilmu politik, memadukan analisis terhadap konteks politik Indonesia sebelum kemerdekaan, perjalanan organisasi PSII, serta dinamika konflik ideologis di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode sejarah dan lebih fokus terhadap pemikiran politik kartosoewirjo dan isi dalam buku *Haluan Politik Islam*.

3. Skripsi

- a. Skripsi yang berjudul “*Pemikiran tentang Hijrah dan Kedudukannya dalam Ketatanegaraan Islam Menurut S.M. Kartosoewirjo*” karya Urfan Hilmi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2006). Skripsi ini membahas secara khusus konsep “Hijrah”, yaitu bentuk permusyawaratan atau badan legislatif dalam sistem Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana dirumuskan Kartosoewirjo. Dalam pembahasannya, skripsi Urfan Hilmi lebih menekankan pada aspek ketatanegaraan dan struktur kelembagaan

¹³ Riyadi Suryana, “Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia”, *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 2 (2019), hal. 83-95

politik yang dibangun Kartosoewirjo. Fokus utamanya adalah menjelaskan bagaimana Hurah dirumuskan, apa fungsi yudikatif–legislatifnya, bagaimana posisinya dalam hierarki politik Islam, serta bagaimana Kartosoewirjo menekankan prinsip “musyawarah dan syariat” sebagai dasar legitimasi politik dalam negara Islam yang ia cita-citakan.¹⁴

Skripsi Urfan Hilmi menggunakan metode penelitian *Content Analysis*, yaitu metode yang bisa digunakan dalam penelitian yang bersifat normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode sejarah.

- b. Skripsi yang berjudul “*Pemikiran Keagamaan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo 1927–1962*” karya Asep Ilham, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023). Skripsi ini meneliti perkembangan pemikiran keagamaan Kartosoewirjo dari masa muda hingga masa kepemimpinannya dalam Negara Islam Indonesia (NII). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan Kartosoewirjo dibentuk melalui tiga faktor utama, yaitu latar belakang keluarga religius, pendidikan dan pergaulannya di lingkungan Sarekat Islam (SI), serta pengaruh kondisi sosial-politik Indonesia sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan. Asep Ilham menekankan bahwa pemikiran keagamaan Kartosoewirjo tidak lahir secara tiba–tiba, tetapi berkembang melalui proses yang panjang dan berlapis, terutama melalui integrasi antara pemahaman agama, pengalaman politik, dan interpretasi terhadap realitas umat Islam pada masanya.¹⁵

Secara umum, skripsi ini menitikberatkan pada aspek keagamaan, yaitu bagaimana Kartosoewirjo memahami Islam, bagaimana ia

¹⁴ Urfan Hilmi, *Pemikiran Tentang Hurah Dan Kedudukannya Dalam Ketatanegaraan Islam Menirli S M. Kartosoewirjo*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006)

¹⁵ Asep Ilham, *Pemikiran Keagamaan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo 1927–1962*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

menafsirkan syariat, jihad, kepemimpinan, serta bagaimana pemahaman keagamaannya membentuk sikap politiknya. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada aspek pemikiran politik.

4. Tesis

- a. Tesis berjudul *“Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia”* karya Rudiansyah, UIN Sumatera Utara (2021). Tesis membahas secara sistematis konsep politik Kartosoewirjo yang melatarbelakangi pendirian Negara Islam Indonesia (NII). Penelitian ini menekankan bahwa pemikiran politik Kartosoewirjo berpijak pada keyakinannya akan supremasi syariat Islam dalam kehidupan bernegara, sehingga negara ideal menurutnya harus berlandaskan hukum Allah dan dipimpin oleh seorang Imam yang menjadi pusat otoritas politik dan spiritual. Tesis ini menunjukkan bahwa Kartosoewirjo memandang kemerdekaan Indonesia bukan semata pembebasan politik dari kolonialisme, tetapi sebagai momentum untuk menegakkan tata negara Islam yang menyatukan agama dan kekuasaan. Rudiansyah juga menguraikan bagaimana pengalaman Kartosoewirjo di lingkungan Sarekat Islam, pemikirannya tentang jihad, serta kekecewaannya terhadap pemerintah Republik Indonesia pasca-Perjanjian Renville turut membentuk keyakinannya bahwa perjuangan menegakkan Islam harus diwujudkan dalam bentuk negara yang sepenuhnya tunduk pada syariat. Analisis dalam tesis ini memetakan gagasan Kartosoewirjo mulai dari bentuk negara, struktur kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, hingga konsep hubungan antara rakyat dan pemimpin.¹⁶

Aspek konseptual politik Kartosoewirjo, yakni bagaimana ia membayangkan bentuk negara Islam dan alasan ideologis yang

¹⁶ Rudiansyah, *Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tentang Negara Islam Indonesia*, (Tesis, UIN Sumatera Utara, 2021)

mendorong pendirian NII. Penelitian tesis ini mendeskripsikan ide-ide politik Kartosoewirjo berdasarkan berbagai dokumen gerakan dan catatan sejarah perjuangannya, serta memandang pemikirannya sebagai respon terhadap kondisi politik Indonesia pada masa transisi kemerdekaan dengan menggunakan metode kualitatif dan tidak terfokus pada satu karya Primer tertentu.

Perbedaan inilah yang menjadi *research gap* bagi penelitian penulis. Penelitian penulis berjudul “*Pemikiran Politik Kartosoewirjo dalam Buku Haluan Politik Islam*” justru menempatkan satu karya primer, yaitu *Haluan Politik Islam*, sebagai objek utama untuk menelusuri konstruksi pemikiran politik Kartosoewirjo secara lebih autentik.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan sebuah penelitian. Dalam penelitian sejarah, terdapat metodologi khusus yang dikenal sebagai Metode Penelitian Sejarah, yaitu panduan yang digunakan dalam proses penelitian sejarah. Metode ini melibatkan pengujian dan analisis kesaksian sejarah untuk memperoleh data yang autentik dan terpercaya, serta upaya merekonstruksi peristiwa masa lalu menjadi narasi sejarah.¹⁷ Gilbert J. Garraghan dalam bukunya yang berjudul *A Guide to Historical Method* mendefinisikan metode sejarah sebagai suatu kumpulan prinsip dan aturan yang tersusun secara sistematis, dibuat untuk mempermudah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilai sumber-sumber tersebut secara kritis, serta menyusun suatu rangkuman atau uraian (biasanya dalam bentuk tulisan) atas temuan yang diperoleh. Secara singkat, metode sejarah dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang tepat untuk mencapai kebenaran historis.¹⁸

¹⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, ed. Beni Ahmad Saebani, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal.74

¹⁸ Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1946), hal. 33

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti menemukan atau memperoleh. *Heuristik* dipandang sebagai sebuah teknik atau seni, bukan sebagai ilmu. Karena itu, *heuristik* tidak memiliki aturan-aturan baku yang bersifat umum. Pada praktiknya, *heuristik* lebih merupakan keterampilan dalam menemukan, mengolah, serta merinci bibliografi, sekaligus mengklasifikasi dan menjaga catatan-catatan.¹⁹ Pada tahap ini, penulis menelusuri berbagai sumber yang diperlukan untuk menunjang penelitian, termasuk karya-karya yang ditulis oleh S.M Kartosuwiryo. Pencarian dilakukan melalui internet dan dengan mengunjungi sejumlah perpustakaan, seperti Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kampus, dan perpustakaan fakultas. Dari proses tersebut, penulis berhasil memperoleh berbagai sumber yang relevan untuk penelitian ini, berupa buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal. Berdasarkan asal-usulnya, pada tahap heuristik ini sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian seorang saksi mata, atau saksi dengan indera lainnya, atau kesaksian dari alat mekanis seperti dictaphone yaitu kesaksian dari seseorang atau sesuatu yang hadir pada peristiwa yang diceritakan (yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata). Namun, sumber primer tidak harus merupakan dokumen asli dalam pengertian hukum yakni dokumen (biasanya draft tertulis pertama) yang isi persisnya sedang dibahas karena sering kali salinan yang dibuat kemudian atau edisi cetak dapat berfungsi sama baiknya; dan dalam kasus karya klasik Yunani dan

¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 101

Romawi hampir selalu yang tersedia hanyalah salinan-salinan belakangan.²⁰

Pada penelitian ini, penulis menemukan sumber-sumber primer yaitu tulisan dari Kartosoewirjo yang relevan dengan penelitian ini:

- 1) Buku *Haluan Politik Islam* karya Kartosoewirjo
- 2) Buku *Sikap Hidjrah Jilid 2* karya Kartosoewirjo
- 3) Buku *Nasib Rakyat di Tanah Jajahan* Karya Kartosoewirjo

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi mata, yakni seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang ia ceritakan.²¹ Pada tahap ini, penulis mencari dan mendapatkan beberapa sumber-sumber sekunder yang berupa buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis:

- 1) Buku *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII SM Kartosoewirjo mengungkap manipulasi sejarah Darul Islam/DI-TII semasa orde lama dan orde baru* karya Al Chaidar (1999)
- 2) Buku *Kahar Muzakkar & Kartosoewirjo: Pahlawan atau Pemberontak?!* karya Suwelo Hadiwijoyo (2013)
- 3) Buku *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam* karya Al-Chaidar (1999)
- 4) Buku Cornelis van Dijk *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Grafiti Pers dengan judul *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (1983)

²⁰ Louis Gottschalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method* (New York: alfred A. Knoff, 1969) hal. 53-54

²¹ Louis Gottschalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, hal. 53-54

- 5) Akbarudin AM, “Pemikiran S.M. Kartosoewirjo Tentang Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2013)
- 6) Carissa Almaasah Budita, “Dinamika Politik dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia Tahun 1946-1962”, *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP UNJA*, Vol. 3, No.1 (2023)
- 7) Riyadi Suryana, “Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia”, *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 1, No.2 (2019)
- 8) Miftakhur Ridlo, “Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo (Konsepsi Gerakan Politik, Militer Dan Agama)”, *Pena Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019)
- 9) Risman, *Strategi Politik Sukarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam Mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2019
- 10) Sarina, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (Studi Tentang Pembentukan Negara Islam Indonesia 1945-1962)*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar) 2018
- 11) Asep Ilham, *Pemikiran Keagamaan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo 1927-1962*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 2023
- 12) Urfan Hilmi, *Pemikiran Tentang Hurah Dan Kedudukannya Dalam Ketatanegaraan Islam Menurut S M. Kartosoewirjo*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 2006
- 13) Rudiansyah, *Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia*, (Tesis, UIN Sumatera Utara Medan) 2021

2. Kritik

Sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahap heuristik perlu diuji terlebih dahulu. Pengujian ini dilakukan melalui proses kritik. Setelah topik ditentukan dengan jelas dan sumber-sumber berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sejarah untuk menilai keabsahan sumber. Proses verifikasi ini terbagi menjadi dua jenis: autentisitas, yakni pemeriksaan keaslian sumber (kritik ekstern), serta kredibilitas, yaitu penilaian apakah isi sumber dapat dipercaya (kritik intern).²²

a. Kritik Eksternal

- 1) Buku *Haluan Politik Islam* merupakan karya yang disusun oleh Kartosoewirjo dan menjadi salah satu sumber primer dalam penelitian ini. Penulis memperoleh buku tersebut di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan buku yang diterima merupakan cetakan ulang tahun 2019 yang diterbitkan oleh Sega Arsy. Kondisi fisik buku tersebut sangat baik, tidak mengalami kerusakan, dan keseluruhan teks dapat dibaca dengan jelas. Meskipun buku yang digunakan bukanlah naskah asli yang ditulis secara langsung oleh Kartosoewirjo pada masa perjuangannya, tetapi sebagai hasil cetakan ulang yang mempertahankan isi dan struktur teks, buku ini tetap dapat dikategorikan sebagai sumber primer, karena memuat gagasan dan pemikiran Kartosoewirjo secara substantif. Dengan demikian, dari sisi fisik buku ini otentik sebagai reproduksi resmi dan layak dijadikan dasar untuk analisis isi dalam penelitian sejarah pemikiran.
- 2) Buku *Sikap Hidjrah* juga merupakan salah satu karya yang dinisbatkan kepada Kartosoewirjo dan dijadikan sumber penting dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh buku ini di

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hal. 77

perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bentuk cetakan ulang modern yang diterbitkan kembali untuk kepentingan kajian akademik. Kondisi fisik buku yang diterima sangat baik dan seluruh isi teks dapat dibaca dengan jelas tanpa mengalami kerusakan ataupun kekurangan halaman. Meskipun buku tersebut bukan merupakan naskah asli yang ditulis langsung oleh Kartosoewirjo pada masa sebelum proklamasi NII, cetakan ulang ini tetap memuat substansi pemikiran yang sama dengan teks aslinya berdasarkan hasil transliterasi dan reproduksi dari dokumen-dokumen terdahulu. Oleh karena itu, buku *Sikap Hidjrah Jilid 2* tetap dapat dikategorikan sebagai sumber primer, karena merepresentasikan gagasan dan kerangka pemikiran Kartosoewirjo sebagaimana dituliskan pada periode awal pembentukan ideologinya. Dengan demikian, secara eksternal buku ini dapat dinilai autentik sebagai reproduksi teks pemikiran Kartosoewirjo dan layak digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

- 3) Buku *Nasib Rakyat di Tanah Jajahan* merupakan salah satu karya Kartosoewirjo dan digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber primer pendukung. Peneliti memperoleh buku ini dalam bentuk cetakan ulang modern yang diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kondisi fisik buku berada dalam keadaan baik, teks dapat dibaca dengan jelas, dan tidak ditemukan indikasi pengurangan atau penambahan isi yang signifikan dibandingkan dengan edisi-edisi terdahulu yang dirujuk dalam literatur sekunder. Meskipun buku yang digunakan bukan merupakan naskah asli sezaman, namun isi buku tersebut merupakan reproduksi dari tulisan Kartosoewirjo pada masa kolonial, sehingga tetap merepresentasikan gagasan asli penulis. Dengan demikian, secara eksternal buku ini dapat dikategorikan sebagai

sumber primer, karena memuat pemikiran Kartosoewirjo yang ditulis langsung olehnya dan mencerminkan konteks sejarah ketika gagasan tersebut dirumuskan.

b. Kritik Internal

Kritik intern berfokus pada pengujian isi dari sumber tersebut. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah informasi yang terkandung dalam sumber tersebut dapat dipercaya dan diandalkan.

- 1) Buku *Haluan Politik Islam*, Buku ini ditulis pada 1946 di Malangbong dan merupakan rangkuman pidato politik Kartosoewirjo saat menjadi Komisaris Masyumi Jawa Barat, berisi tanggapan atas situasi revolusi kemerdekaan dan kekhawatirannya terhadap arus politik pasca-proklamasi. Dalam bahasa yang sederhana dan tegas, ia menjelaskan haluan politik seorang Muslim, hubungan antara umat Islam, ideologi, politik, negara, dan kemerdekaan, serta menekankan perlunya dua jenis revolusi: revolusi nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional, dan revolusi sosial untuk mengubah masyarakat dari dalam dengan dukungan rakyat, sekaligus mengembangkan ideologi Islam. Buku ini bukan sekadar teori, tetapi panduan praktis yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari isi buku tersebut maka penulis mengklasifikasikan buku ini sebagai sumber primer.
- 2) Buku *Sikap Hijrah Jilid 2*, isi buku Sikap Hijrah menunjukkan karakter pemikiran Kartosoewirjo pada periode awal pembentukan ideologinya, ketika ia masih berada dalam lingkungan PSII. Secara internal, teks ini lebih menekankan ajakan moral dan spiritual terkait kewajiban hijrah sebagai bentuk komitmen terhadap perjuangan Islam. Oleh karena itu, kandungan isi buku ini sangat normatif dan sarat nuansa

teologis. Penilaian terhadap kondisi sosial-politik yang digambarkan di dalamnya tidak bersifat analitis atau deskriptif secara objektif, tetapi lebih merupakan interpretasi ideologis dari Kartosoewirjo terhadap situasi yang ia anggap sebagai ancaman bagi umat Islam.

- 3) Buku *Nasib Rakyat di Tanah Jajahan*, secara internal, isi buku *Nasib Rakyat di Tanah Jajahan* menunjukkan konsistensi dengan karakter pemikiran Kartosoewirjo pada fase awal pembentukan kesadaran politiknya. Buku ini memuat kritik tajam terhadap kolonialisme, penindasan ekonomi, serta penderitaan rakyat pribumi di bawah kekuasaan penjajah. Gagasan yang disampaikan bersifat polemis dan normatif, dengan penekanan pada ketidakadilan struktural yang dialami rakyat jajahan. Meskipun buku ini belum secara eksplisit merumuskan konsep negara Islam sebagaimana terdapat dalam Haluan Politik Islam, namun secara substansial buku ini memperlihatkan fondasi pemikiran politik Kartosoewirjo, terutama dalam melihat relasi antara kekuasaan, penindasan, dan keharusan menghadirkan tatanan sosial-politik yang berkeadilan. Oleh karena itu, buku ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sebagai sumber untuk menelusuri perkembangan awal pemikiran politik Kartosoewirjo, meskipun tidak digunakan sebagai sumber utama analisis konsep politik Islam dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Penafsiran dalam penulisan sejarah kerap dianggap sebagai sumber subjektivitas. Pandangan ini ada benarnya, namun tidak sepenuhnya tepat. Memang, tanpa adanya penafsiran dari sejarawan, data sejarah tidak akan memiliki makna. Sejarawan yang bertanggung jawab akan menyertakan data beserta asal-usulnya, sehingga memungkinkan orang

lain untuk meninjau dan menafsirkan ulang. Karena itu, subjektivitas dalam sejarah diakui keberadaannya, tetapi tetap perlu dihindari.²³

Analisis pada tahapan ini diarahkan untuk menginterpretasikan gagasan-gagasan politik dalam buku *Haluan Politik Islam* secara kontekstual, dengan mengorelasikannya pada dinamika sosial, konseptualisasi intelektual, dan konjunktur politik yang melatarbelakangi masa penciptaan karya tersebut. Untuk memperkuat proses penafsiran, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah intelektual (*intellectual history*). Sejalan dengan pemikiran James Harvey Robinson, sejarah intelektual tidak hanya memusatkan perhatian pada pemikiran tokoh besar secara individual, tetapi juga pada gagasan-gagasan yang hidup dan berkembang dalam lingkungan intelektual yang lebih luas, termasuk keyakinan, cara berpikir, serta sumber-sumber pengetahuan yang memengaruhi lahirnya suatu pandangan politik.²⁴ Oleh karena itu, sejarah intelektual menempatkan ide dalam konteks historisnya, sehingga memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana suatu gagasan lahir, diterima, diperdebatkan, dan mengalami perubahan makna seiring dengan dinamika zamannya.

Pendekatan sejarah intelektual digunakan karena penelitian ini tidak hanya berupaya merekonstruksi peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Kartosoewirjo, tetapi secara khusus menelaah ide, konsep, dan konstruksi pemikiran politik yang ia rumuskan dalam *Haluan Politik Islam*. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemikiran politik Kartosoewirjo dipahami sebagai produk dialektika antara pengalaman personal, dinamika politik awal kemerdekaan, serta tradisi intelektual Islam yang memengaruhi cara pandanganya terhadap negara, ideologi, dan kekuasaan. Pendekatan sejarah intelektual dinilai paling sesuai karena memungkinkan peneliti membaca teks *Haluan Politik Islam* tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai ekspresi

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hal. 78

²⁴ James Harvey Robinson, *The New History*, (New York: The Free Press, 1965) hal. 101-106

intelektual yang mencerminkan pergulatan ideologis Kartosoewirjo dalam merespons kondisi zamannya.

4. Historiografi

Historiografi adalah proses rekonstruksi imajinatif masa lalu berdasarkan data yang diperoleh melalui metode sejarah. Dalam proses ini, sejarawan menyusun kembali peristiwa secara sistematis dan logis, menyeimbangkan fakta dari sumber dengan interpretasi rasional, sehingga mendekati gambaran masa lalu “sebagaimana sebenarnya terjadi.” Historiografi membedakan sejarah dari fiksi atau karya sastra lain karena imajinasi digunakan untuk merekonstruksi, bukan menciptakan, peristiwa, sehingga sejarah dapat dipahami dan disampaikan secara akurat.²⁵

Penulisan historiografi dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan mengenai latar sosial-politik Indonesia pasca-kemerdekaan, dinamika ideologi nasionalis–Islam–komunis, serta perjalanan intelektual Kartosoewirjo, kemudian mengaitkannya dengan isi dan struktur pemikiran yang tertuang dalam *Haluan Politik Islam*. Dalam proses ini, penulis menyusun narasi yang tidak hanya bersifat kronologis, tetapi juga analitis, sehingga dapat memperlihatkan bagaimana ide-ide Kartosoewirjo berkembang, berubah, atau menguat seiring perubahan situasi politik yang ia hadapi.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks historis kemunculan pemikiran politik Kartosoewirjo serta pentingnya kajian terhadap buku *Haluan Politik Islam*. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Bab ini memberikan gambaran awal secara menyeluruh mengenai arah

²⁵ Louis Gottschalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, hal. 48-49

penelitian yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

BAB II, membahas konteks historis pemikiran Kartosoewirjo, meliputi biografi singkatnya, situasi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, serta latar waktu, alasan, dan fungsi penulisan buku *Haluan Politik Islam*. Bab ini memberikan dasar historis sebelum menganalisis isi buku.

BAB III, berisi analisis struktur dan isi buku *Haluan Politik Islam*, pembahasan mengenai konsep-konsep utama pemikiran politik Kartosoewirjo dalam buku tersebut, serta implementasi pemikiran politik Kartosoewirjo dalam Gerakan DI/TII. Bab ini merupakan inti penelitian karena fokus pada interpretasi isi teks.

BAB IV, memuat kesimpulan terhadap hasil penelitian mengenai pemikiran politik Kartosoewirjo dalam buku *Haluan Politik Islam*.

